

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN POSO**



# PEMERINTAH KABUPATEN POSO

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. Pulau Sumba No. 1 Telp. (0452) 21454 Fax No.21545 Poso 94619

### KEPUTUSAN

#### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor : 525.1/ /Kesbangpol/2023

#### TENTANG

#### RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. Bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terintegrasi dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan.
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan tahunan Perangkat Daerah berjalan efektif, efisien dan mencapai sasaran serta tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008, tentang Kewenangan Daerah kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2015, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Poso Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Poso Tahun 2000 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Poso Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) Kabupaten Poso Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso 2016 – 2021.
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2016-2021.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO TAHUN 2023

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui berbagai pilihan Kebijakan dengan memperhitungkan Sumber Daya yang tersedia untuk Kesejahteraan Masyarakat.
2. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, selanjutnya disebut Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappelitbangda selama 5 (lima) tahun.

3. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.
4. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak – pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 2**

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 adalah untuk menyiapkan bahan acuan dalam perencanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 adalah terciptanya konsistensi antara Rencana Strategis (RENSTRA) dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang akan ditetapkan dengan pelaksanaannya.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 merupakan acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Poso tahun 2023, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026.

**BAB IV**  
**PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI RENCANA KERJA**  
**Pasal 4**

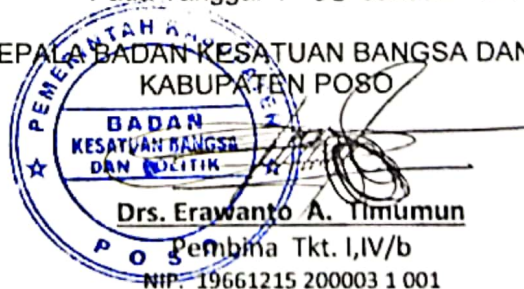
- (1) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2021 – 2026 RKPD Kab. Poso Tahun 2023.
- (2) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 .

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Poso  
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN POSO



Drs. Erawanto A. Timumun  
Pembina Tkt. I, IV/b  
NIP. 19661215 200003 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Nikmat KaruniaNya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso pada hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan Strategi yang memuat Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan VISI dan MISI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023. Dalam penyusunan Rencana Kerja telah mengakomodasi berbagai perubahan Lingkungan Eksternal serta memperhatikan pula kapasitas Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Lingkungan Eksternal dimaksud mencakup perubahan Lingkungan Startegi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sedangkan untuk kapasitas Internal sangat memperhatikan kemampuan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam melaksanakan dan mendukung Tugas dan Fungsi Organisasi yaitu dalam melaksanakan Tugas Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tahun 2022 telah disusun berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang meliputi Kebijakan dan Program serta Kegiatan .

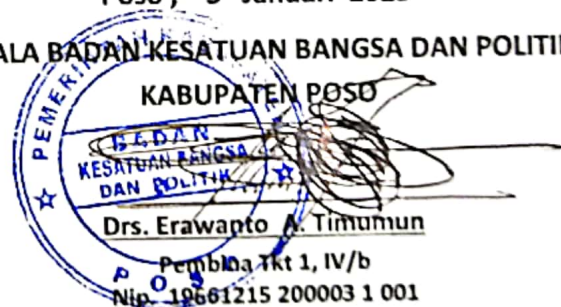
Begitu pentingnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso ini maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Kinerja Organisasi yang baik, berdasarkan pada Perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif.

Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Pejabat Fungsional Umum/staf dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya terhadap penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap melimpahkan KaruniaNya bagi kita semua.

Poso, 3 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN POSO



Drs. Erawanto A. Timumun

Pembina Tkt 1, IV/b

Nip. 19661215 200003 1 001

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. LATAR BELAKANG**
- 1.2. LANDASAN HUKUM**
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**
- 1.4. SISTEMATIKA**

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

**BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis OPD. Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2021 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso ini merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023. Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
9. Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
11. Permendagri nomor 58 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Surat edaran menteri dalam Negeri nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan (RKPD)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No.42 Tambahan lembaran Negara RI No.6322).

14. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.341).
16. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 03).
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 206).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang kewenangan Daerah Kabupaten Poso (lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 No. 1)
21. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2016-3021

### **1.3. Maksud dan tujuan**

Maksud Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas capaian kinerja perangkat daerah.

Tujuan disusunnya rencana kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan Fungsi perencanaan dalam Pembangunan Daerah

2. Mewujudkan dan menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Kestabilan Politik demi menunjang jalannya Pembangunan yang Akuntabel, partisipatif, bermanfaat tepat sasaran dan berkesinambungan
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi
5. Sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan

#### **1.4. Sistematika**

Sistematika Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi uraian tentang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU**

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Bab III menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Out Come 5 Tahun) Sasaran Indicator Kinerja kelompok Sasaran SKPD Tahun rencana (2022)

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Perangkat Daerah**

Bab IV menjelaskan tentang prioritas Program Kegiatan dan Target Kinerja

##### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso**

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso adalah penjabaran perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Tercapainya tidaknya pelaksanaan Kegiatan atau Program yang telah dapat di lihat berdasarkan dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang hendak atau telah di capai sehubungan dengan penggunaan Anggaran dengan Kwantitas dan Kualitas terukur. Untuk mengukur Kinerja itu diperlukan Indicator Kinerja yang merupakan alat ukur untuk mencapai suatu Kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai Kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban Keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, Neraca, laporan arus kas atas catatan laporan Keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan Keuangan tersebut telah di atur PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for money. Dalam konsep ini diperlukan indicator Input(masukan) Output (keluaran) dan output (keluaran) dan outcome(hasil) . Secara rinci indicator-indikator tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Indicator yang menggambarkan segala Indikator Masukan (input) yaitu sesuatu yang di butuhkan baik berupa dana sumber daya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023.
2. Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun berupa Teknologi dan Informasi agar pelaksanaan dan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

3. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang di harapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik fisik maupun berupa fisik.
4. Indicator hasil (outcome), yaitu indikator yang mnunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai di laksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan

Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya seberapa besar Output akan menghasilkan Outcam. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menyajikan hasil pencapaian kinerja Triwulan IV tahun 2022 Sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	100%
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara, Terselenggaranya Kegiatan Paskibraka	100%
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Presentase Partai Politik yang mendapatkan	100%

		Pendidikan Politik serta etika budaya politik	
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%

## 2.2. Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso pada Tahun 2022 dalam analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelayanan Perangkat Daerah dan Masalah-masalah yang dihadapi Perangkat Daerah.

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dalam analisis pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso ini kami dapat sajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra					Realisasi Capaian th ke					Proyeksi Capaian				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTP yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				100 %	100 %			
2	Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	0	2%	4%	6%	8%	100 %	100 %				100 %	100 %			
3	Presentase Ormas yang mendapatkan Pendidikan politik serta Etika Budaya Politik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				100 %	100 %			
4	Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				100 %	100 %			
5	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				100 %	100 %			
6	Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				100 %	100 %			

### **2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.**

Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai- nilai Pancasila telah memunculkan sikap individualistis yang jauh berbeda dengan nilai – nilai Pancasila. Hal seperti ini terlihat pada kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi dalam menyelesaikan masalah bangsa. Pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai – nilai luhur Pancasila dewasa ini juga dinilai telah memudar. Utamanya di kalangan generasi muda.

Demokrasi yang berlebihan dan mudarnya pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat, menjadi masalah yang krusial bagi pemerintah saat ini, disamping majunya pembangunan nasional yang bisa menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Pro kontra yang terjadi akibat pembangunan infra struktur di masyarakat juga harus disikapi oleh pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso diatur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Poso No.27 tahun 2000 dan Peraturan Bupati Poso No.47 tahun 2016.

Dalam melaksanakan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Tugas Pokok menyiapkan bahan perumusan Kebijakan dibidang Politik, Ideologi, penanganan konflik di Kabupaten Poso.

**Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mempunyai Fungsi yaitu :**

1. Perumusan Kebijakan Pembinaan Kesatuan Bangsa
2. Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan kesatuan Bangsa
3. Meningkatkan kegiatan forum komunikasi wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen masyarakat dan lembaga yang ada



1. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso 34 orang yaitu :

**TABEL KEADAAN PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

1. Jenjang Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	S M U	6 orang
2	S 1	13 orang
3	S 2	2 orang

2. Daftar menurut Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV/b	2 Orang
2	Golongan IV/a	1 orang
3	Golongan III/d	6 orang
4	Golongan III/c	4 orang
5	Golongan III/b	3 orang
6	Golongan III/a	1 orang
	Golongan II/d	2 orang
8	Golongan II/b	1 orang
9	Golongan II/a	1 orang

**TABEL KEADAAN TENAGA HONORER**

No	URAIAN	Jumlah
1.	Operator Komputer	6 ORANG
2.	Tenaga Administrasi	7 ORANG

Berdasarkan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari jumlah pegawai tersebut diatas masih ada beberapa orang yang statusnya pegawai honorer

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas semua aspek penting yang telah dikategorikan dari setiap Misi maka diperoleh Empat bidang strategis yang harus diemban untuk mencapai Visi :

1. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Pendidikan Politik Masyarakat
4. Pembinaan Kerukunan Umat beragama

3. Adapun hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso adalah :

1. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
2. Terbatasnya Kualitas sumber daya aparatur.
3. Terbatasnya dukungan fasilitas penunjang.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian Program Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan menetapkan tujuan sebagai berikut:

***“Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik”***

2. Adapun sasaran yang ingin dicapai :

***“Terselesaikannya konflik sosial dimasyarakat”***

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Badan Kesatuan datang dapat dilihat sebagai Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Dalam merealisasikan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso serta Strategi pelayanan yang akan berikut :

Adapun Tantangan dan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam melaksanakan kegiatannya terdiri dari :

1. Peluang :

1. Peraturan Perundang-undangan mengenai otonomi Daerah.
2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang peningkatan kemampuan Aparatur.
3. Ketersediaan media informasi
4. Sinergitas pemangku kepentingan melalui forum komunikasi diskusi politik

2. Tantangan :

1. Kurangnya tempat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang memenuhi syarat
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Kantor Kesbangpol yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang adaKetersediaan media informasi

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Analisis tersebut tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.(Terlampir)

## Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					No	Hasil Analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif Rp		Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	<b>Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	Kab. Poso	Nilai Sakip OPD	B	2,904,989,543	1.	<b>Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	Kab. Poso	Nilai Sakip OPD	B	2,904,989,543	
1.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>2,332,637,748</b>	1.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>		<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>2,332,637,748</b>	
	1. Sub Keg. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	1 Tahun	2,332,637,748		1. Sub Keg. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	1 Tahun	2,332,637,748	
2.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>5,822,800</b>	2.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>5,822,800</b>	
	1. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dok	5,822,800		1. Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dok	5,822,800	
3.	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>210,017,583</b>	3.	<b>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>210,017,583</b>	
	1. Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi listrik yang diadakan	6 jenis	2,200,500		1. Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi listrik yang diadakan	6 jenis	2,200,500	
	2. Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis ATK dan bahan logistik kantor yang diadakan	7 item	3,535,183		2. Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis ATK dan bahan logistik kantor yang diadakan	7 item	3,535,183	
	3. Sub Keg. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang yang dicetak dan di gandakan	24500 lbr	6,228,900		3. Sub Keg. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang yang dicetak dan di gandakan	24500 lbr	6,228,900	
	4. Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Makan minum yang disediakan	135 Dos	1,350,000		4. Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Makan minum yang disediakan	135 Dos	1,350,000	
	5. Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Perjalanan Dinas yang di laksanakan	220 OK	196,703,000		5. Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Perjalanan Dinas yang di laksanakan	220 OK	196,703,000	
2 5.	<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>309,980,912</b>	2 5.	<b>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>309,980,912</b>	
	1. Sub keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang terproses	400 srt	2,180,946		1. Sub keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang terproses	400 srt	2,180,946	
	2. Sub Keg. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening yang di bayarkan dalam setahun	36 Rek	56,203,830		2. Sub Keg. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening yang di bayarkan dalam setahun	36 Rek	56,203,830	
	3. Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 unit	2,450,000		3. Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	5 unit	2,450,000	
	4. Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	22 pegawai	249,146,136		4. Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	22 pegawai	249,146,136	
6	<b>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>46,530,500</b>	6	<b>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>46,530,500</b>	
	1. Sub Keg. Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	10 unit	42,184,000		1. Sub Keg. Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	10 unit	42,184,000	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	12
	2. Sub Keg. Penyediaan Pemeliharaan, meliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	2 unit	500,000		2. Sub Keg. Penyediaan Pemeliharaan, meliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	2 unit	500,000	
	3. Sub Keg. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit	3,846,500		3. Sub Keg. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 unit	3,846,500	
	<b>2. PROGRAM Penguatan Ideologi Panca Sila dan Karakter Kebangsaan</b>		Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	0,005%	588,462,784		<b>2. PROGRAM Penguatan Ideologi Panca Sila dan Karakter Kebangsaan</b>		Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	0,005%	588,462,784	
			Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	4%					Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	4%		
	<i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<i>Cakupan Ormas, Etnis, siswa yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	100%	588,462,784		<i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>		<i>Cakupan Ormas, Etnis, siswa yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	100%	588,462,784	
	1. Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan		Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan yang terbentuk dan di bina	1 FPK	90,623,260		1. Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan		Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan yang terbentuk dan di bina	1 FPK	90,623,260	
	2. Sub Keg. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan		Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembauran Kebangsaan, Bhineka Bela Negara	100 orang 75 orang	453,199,806		2. Sub Keg. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan		Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembauran Kebangsaan, Bhineka Bela Negara	100 orang 75 orang	453,199,806	
	3. Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan		Jumlah Siswa yang dapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	300 siswa	44,639,718		3. Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan		Jumlah Siswa yang dapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	300 siswa	44,639,718	
	<b>3 PROGRAM Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>		Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	100%	1,636,016,398		<b>3 PROGRAM Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>		Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	100%	1,636,016,398	
	1. <i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik</i>		Presentase meningkatnya peran serta Masyarakat/ormas dalam pendidikan politik	98%	1,636,016,398		1. <i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik</i>		Presentase meningkatnya peran serta Masyarakat/ormas dalam pendidikan politik	98%	1,636,016,398	
	1 Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum daerah, serta pemantauan situasi politik		Jumlah Peserta Pembinaan Partai Politik dan Bantuan Dana Hibah untuk Partai Politik	200 org 11 Parpol	1,636,016,398		1 Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum daerah, serta pemantauan situasi politik		Jumlah Peserta Pembinaan Partai Politik dan Bantuan Dana Hibah untuk Partai Politik	200 org 11 Parpol	1,636,016,398	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	12
4.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>		Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	100%	91,435,926	4.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT</b>		Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	100%	91,435,926	
1.	<i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>		Presentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan di bidang pemberdayaan dan pengawasan Ormas	100%	91,435,926	1.	<i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>		Presentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan di bidang pemberdayaan dan pengawasan Ormas	100%	91,435,926	
	1. Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing didaerah		Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang dibina	60 orang	40,246,086		1. Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing didaerah		Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang dibina	60 orang	40,246,086	
	2. Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing didaerah		Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang terpantau baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar	20 Dok	51,189,840		2. Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing didaerah		Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang terpantau baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar	20 Dok	51,189,840	
5.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>		Presentase Perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 Kecamatan		136,599,328	5.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>		Presentase Perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 Kecamatan		136,599,328	
1.	<i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi sosial dan budaya</i>		Presentase Pembinaan Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan kerukunan umat bergama di 19 kecamatan		136,599,328	1.	<i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi sosial dan budaya</i>		Presentase Pembinaan Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan kerukunan umat bergama di 19 kecamatan		136,599,328	
	1. Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Peserta Sosialisasi/penyuluhan terkait penyalahgunaan Narkotika	200 org	35,323,944		1. Sub Keg. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Peserta Sosialisasi/penyuluhan terkait penyalahgunaan Narkotika	200 org	35,323,944	
	2. Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4 kali	73,501,384		2. Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	4 kali	73,501,384	
	3. Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Presentase terpantaunya situasi perekonomian, sosial, budaya dan narkotika kerukunan umat beragama	4 Dok	27,774,000		3. Sub Keg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Presentase terpantaunya situasi perekonomian, sosial, budaya dan narkotika kerukunan umat beragama	4 Dok	27,774,000	
6.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100	349,257,696	6.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>		Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100	349,257,696	
1.	<i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		Presentase terpantaunya situasi dan kondisi tentang ketertiban umum dan penanganan konflik sosial yang tertangani	100%	349,257,696	1.	<i>Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>		Presentase terpantaunya situasi dan kondisi tentang ketertiban umum dan penanganan konflik sosial yang tertangani	100%	349,257,696	
	1. Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		Presentase Kerjasama antar lembaga dalam penanganan konflik sosial yang terjadi	10%	177,846,750		1. Sub Keg. Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		Presentase Kerjasama antar lembaga dalam penanganan konflik sosial yang terjadi	10%	177,846,750	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	12
	2.	Sub Keg. PelaksanaanMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penaganan konflik di daerah	Jumlah Pencegahan Penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	80 dok	61,587,900		2.	Sub Keg. PelaksanaanMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penaganan konflik di daerah	Jumlah Pencegahan Penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	80 dok	61,587,900	
	3.	Sub Keg. Pelaksanaan Forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Rapat koordinasi Pimpinan Daerah	8 kali	109,823,046		3.	Sub Keg. Pelaksanaan Forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Rapat koordinasi Pimpinan Daerah	8 kali	109,823,046	
<b>Jumlah</b>					<b>5,706,761,675</b>	<b>Jumlah</b>					<b>5,706,761,675</b>	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun yaitu untuk tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Poso yang menyangkut Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam Bab ini. Memperhatikan dan mengacu Visi dan Misi Bupati Poso serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Poso sebagai perangkat daerah yang menangani bidang Politik, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa sebagai berikut :

*Visi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Poso*

***Poso menjadi maju, tangguh dan terdepan di Sulawesi Tengah.***

*Misi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Poso*

***Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni dan tangguh bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan dan damai.***

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah saat ini masih tetap merintangai perjalanan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan integrasi Nasionalnya, apalagi dalam era globalisasi dan keterbukaan serta adanya semangat Reformasi yang berlebihan dapat menimbulkan kerawanan dalam upaya pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kalau tidak hati-hati menanganinya tidak mustahil terjadi disintegrasi/perpecahan Bangsa. Oleh sebab itu menjaga keutuhan dan kelestarian Bangsa melalui semangat/jiwa persatuan dan kesatuan merupakan kebutuhan mutlak serta sekaligus merupakan tantangan yang tidak ringan. Mengembangkan sikap ideologi



sebagai upaya menjaga agar dinamika yang dikembangkan tidak keluar dari Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar Negara dan Ideologi Nasional. Diharapkan semangat persatuan dan kesatuan Bangsa tetap menggelora didada setiap insan Indonesia sehingga mampu menciptakan kondisi yang kondusif terhadap perwujudan persatuan dan Kesatuan Bangsa.

### 3.2. **Tujuan dan Sasaran** Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan, Program kegiatan, Indikator Kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso didasari oleh Visi dan Misi, adapun Visi dan Misinya adalah sebagai berikut :

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso :

***“Poso menjadi Kabupaten maju, tangguh dan terdepan di Sulawesi Tengah***

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Poso :

***Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni dan tangguh bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan dan damai***

Berdasarkan Visi dan Misi diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

#### A. TUJUAN

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso menetapkan Tujuan sebagai berikut :

***Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan Bangsa dan Politik***

#### B. SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

***Terselesaikanya konflik Sosial.***

### C. STRATEGI

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam implementasi rumusan Program dan Kegiatan yang terencana, terukur, transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan peran masyarakat dalam peningkatan dan pemahaman wawasan kebangsaan
2. Mengembangkan sistem politik yang demokratis
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas LSM, Ormas dan OKP
4. Memajukan Seni dan Budaya sebagai alat pemersatu bangsa

### D. Arah Kebijakan

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wawasan Kebangsaan.
2. Peningkatan Peran serta Partai Politik dan masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas LSM, Ormas dan OKP
4. Peningkatan pembinaan masyarakat dalam upaya pelestarian seni dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan, Program Kegiatan, Indikator Kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dapat ditabulasikan sebagai berikut :

### ***Visi dan Misi***

No	Visi	Misi
1	2	3
	Poso menjadi Kabupaten maju, tangguh dan terdepan di Sulawesi Tengah	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni dan tangguh bencana, sadar akan lingkungan berkelanjutan dan damai

**Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan,**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	Program
Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Terselesaikanya konflik sosial	Memantapkan peran masyarakat dalam peningkatan dan pemahaman wawasan kebangsaan	Memantapkan wawasan kebangsaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Penataran Ketahanan Bangsa dan cinta tanah air	Program Pengembangan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Mengembangkan sistem Politik Demokratis	Peningkatan peran serta Partai Politik dan masyarakat dalam mengikuti Pendidikan Politik	Pembinaan Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas LSM, Ormas dan OKP	Peningkatan kualitas dan kuantitas LSM, Ormas dan OKP	Pembinaan LSM Ormas dan OKP	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
		Memajukan Seni dan Budaya sebagai alat pemersatu Bangsa	Peningkatan pembinaan masyarakat dalam upaya pelstarian seni dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan urusan kebangsaan		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Peningkatan peran serta partai politik dan masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik		
			Peningkatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP		
			Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam men gembangkan urusan kebangsaan		

### **Indikator Kinerja dan Target**

Indikator Kinerja Utama	Kondisi pada awal Periode RPJMD	Target kinerja pada tahun ke						Kondisi pada awal Periode RPJMD
		1	2	3	4	5		
Nilai Sakip OPD	B	B	BB	BB	A	A	A	A
Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	0,025%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,0025%
Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	0	0	2%	4%	6%	8%	10%	10%
Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Perkembangan kasus ketahanan ekonomi, social dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Poso untuk Tahun 2023 memuat Rencana dalam pencapaian Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Program dan Kegiatan Kerja harus dengan Visi dan Misi serta arah pembangunan pemerintah Daerah yang telah dijabarkan ke dalam Renstra tahun 2021-2026. Program dan Rencana Kerja dapat dilihat pada **Lampiran** :

### RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023

Program	Kegiatan	Urusan	Bidang Urusan	Sub Kegiatan	Keluaran	
2	3	4	5	6	7	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	
			Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan
			Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan
			Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum yang di sediakan
			Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang dilaksanakan
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terproses
			Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan dalam setahun
			Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara
		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara
		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah kecamatan yang terbentuk FPK
		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi dan wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Bela Negara dan Jumlah Peserta Penyukuhan Pencegahan Paham yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila
		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Siswa yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<i>Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.</i>	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah.	Jumlah peserta pembinaan partai politik dan bantuan dana hibah untuk partai politik
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<i>Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi
		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<i>Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan' di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan terkait penyalahgunaan Narkotika

		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama
		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti dialog antar umat beragama
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KWALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<i>Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik Sosial</i>	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama intelejen pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan pembatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani
		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama intelejen pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan pembatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani
		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama intelejen pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan pembatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani
		Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 antara lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Poso  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso

Sub Unit Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01.00 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Poso

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Perkiraan maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Tolak ukur	Target	Target capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Keg	Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			13	14	15
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								5,706,761,675						6,049,061,869
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Presentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan dengan baik	Presentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan dengan baik	Kab. Poso	Nilai BB	100%	100%	2,904,989,543	APBD	Nilai Sakip OPD	Presentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan dengan baik	Nilai Sakip OPD	100%	2,904,989,543
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan dengan baik	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Poso	Nilai BB	6 Dokumen	100%	5,822,800		Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan dengan baik	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan dengan baik	6 Dokumen	5,822,800
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Poso	Nilai BB	6 Dokumen	100%	5,822,800		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	5,822,800
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Twrbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Kab. Poso	Nilai BB	12 Bulan	100%	2,332,637,748		Twrbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Twrbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,332,637,748
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Twrbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Kab. Poso	Nilai BB	12 Bulan	100%	2,332,637,748		Twrbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	Twrbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,332,637,748
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Poso	Nilai BB	100%	100%	210,017,583		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	210,017,583
8.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Poso	Nilai BB	8 Jenis	100%	2,200,500		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	8 Jenis	2,200,500
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi	Kab. Poso	Nilai BB	7 Ruangan	100%	3,535,183		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	7 Ruangan	3,535,183

8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan	Presetase Cakupan Pelayanan Administrasi	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	14668 Imbar	100%	6,228,900		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	25000 Ibr	6,228,900
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Makan Minum yang di sediakan	Presetase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	135 dos	100%	1,350,000		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Makan Minum yang di sediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	300 dos	1,350,000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Perjalanan Dinas Yang dilaksanakan	Presetase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	137 ok	100%	196,703,000		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Perjalanan Dinas Yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	150 ok	196,703,000
8.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<b>Kab. Poso</b>	<b>Nilai BB</b>	100%	100%	<b>309,980,912</b>		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	<b>309,980,912</b>
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Surat yang Terproses	Presentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	400 surat	100%	2,180,946.00		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Surat yang Terproses	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	400 surat	2,180,946.00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Rekening yang dibayarkan dalam setahun	Presentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	3 rek	100%	56,203,830.00		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Rekening yang dibayarkan dalam setahun	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3 rek	56,203,830.00
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	10unit	100%	2,450,000.00		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	10unit	2,450,000.00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Presentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	22 Pegawai	100%	249,146,136.00		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	22 Pegawai	249,146,136.00
8.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Presentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	100%	100%	<b>46,530,500</b>		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	<b>46,530,500</b>
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Presentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	10 unit	100%	42,184,000		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 unit	42,184,000
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Presentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	2 unit	100%	500,000		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 unit	500,000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	Presentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	<b>Kab. Poso</b>	Nilai BB	1 unit	100%	3,846,500		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 unit	3,846,500

8.01.02	PROGRAM PENGUJATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Kab. Poso	0,005%	0,005%	2%	588,462,784	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	0,005%	885,262,978
8.01.02.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah Ormas, Etnis, siswa dan masyarakat yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Ormas, Etnis, siswa dan masyarakat yang memperoleh Pengembangan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Kab. Poso	0,005%	0,005%	2%	588,462,784	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah Ormas, Etnis, siswa dan masyarakat yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	0,005%	885,262,978
8.01.02.2.01.01	penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	jumlah kecamatan yang terbentuk FPK	Presentase Ormas, Etnis, siswa dan masyarakat yang memperoleh Pengembangan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	kec. Lore Utara	0,005%	1 FPK	2%	90,623,260	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	jumlah kecamatan yang terbentuk FPK	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	1 FPK	90,623,260
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi dan wawasan BELA Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Bela Negara dan Jumlah Peserta Penyukuhan Pencegahan Paham yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan terselenggaranya kegiatan Paskibraka	Presentase Ormas, Etnis, siswa dan masyarakat yang memperoleh Pengembangan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Poso Kota	0,005%	25 org	2%	453,199,806	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Bela Negara dan Jumlah Peserta Penyukuhan Pencegahan Paham yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan terselenggaranya kegiatan Paskibraka	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	25 org	750,000,000
8.01.02.1.02.04	pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan,bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Siswa yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	presentase hasil perumusan kebijakan teknis dan pematapan bidang ideologi dan Pncasila	Kec. Poso Pesisir Utara	0,005%	100 siswa	2%	44,639,718	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Jumlah Siswa yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Ormas, Etnis, Siswa dan Masyarakat yang memperoleh Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	100 siswa	44,639,718

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Kab. Poso	100%	100%	100%	1,636,016,398		Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	100%	1,636,016,398
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Presentase meningkatnya peran serta masyarakat / ormas dalam pendidikan politik	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Kab. Poso	100%	100%	100%	1,636,016,398		Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Presentase meningkatnya peran serta masyarakat / ormas dalam pendidikan politik	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	100%	1,636,016,398
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah.	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Jumlah peserta pembinaan partai politik dan bantuan dana hibah untuk partai politik	Presentase hasil kebijkn teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Politik	Poso Kota	100%	50 peserta	100%	1,636,016,398	Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	Jumlah peserta pembinaan partai politik dan bantuan dana hibah untuk partai politik	Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta etika budaya politik	50 peserta	1,636,016,398
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi		100%	100%	100%	91,435,926		Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	100%	91,435,926

8.01.04.2.01	<b>Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Jumlah Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Kab. Poso	100%	100%	100%	91,435,926	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Jumlah Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	100%	91,435,926
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang dibina	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Kec. Pamona Barat	100%	60 peserta	100%	40,246,086	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang dibina	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	60 peserta	40,246,086
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang terpantau Baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Kab. Poso	100.0	24 dokumen	100%	51,189,840	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	Cakupan Ormas, LSM dan OKP yang terpantau Baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar	Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	24 dokumen	51,189,840
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan</b>	<b>Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan</b>	<b>Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>136,599,328</b>	<b>Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan</b>	<b>Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan</b>	<b>Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>136,599,328</b>
8.01.05.2.01	<b>Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Kab. Poso	100%	100%	100%	136,599,328	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100%	136,599,328
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan' di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan terkait penyalahgunaan Narkotika	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Kec. Poso Pesisir Utara	100%	60 orang	100%	35,323,944	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan terkait penyalahgunaan Narkotika	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	60 orang	35,323,944

8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Kec. Pamona Tenggara dan Poso Kota	100%	2 kali	100%	73.501,384	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	Presentase perkembangan kasus ketahanan ekonomi, sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	2 kali	73,501,384
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah	Cakupan Sekolah Ormas, Etnis dan keagamaan yang memperoleh pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti dialog antar umat beragama	Presentase Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Poso	95	4 dokumen	100%	27,774,000	Cakupan Sekolah Ormas, Etnis dan keagamaan yang memperoleh pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti dialog antar umat beragama	Cakupan Sekolah Ormas, Etnis dan keagamaan yang memperoleh pengembangan Wawasan Kebangsaan	4 dokumen	27,774,000
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Kab. Poso	100%	100%	100%	349,257,696	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%	394,757,696
8.01.06.2.01	<b>Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik Sosial</b>	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani		100%	100%	100%	349,257,696	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%	394,757,696
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama intelejen pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan pembatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah									Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Jumlah Kecamatan yang terbentuk FKDM	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	1 kec	45,500,000

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama intelejen pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan pembatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentase Kerjasama antar lembaga dalam penanganan konflik sosial yang terjadi	Prosentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik Sosial	Kec. Poso Pesisir Utara	100%	10%	100%	177,846,750	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Presentase Kerjasama antar lembaga dalam penanganan konflik sosial yang terjadi	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	10%	177,846,750
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama intelejen pemantauan Orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan pembatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Jumlah pencagahan penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Prosentase perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Poso	100%	80 dokumen	100%	61,587,900	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Jumlah pencagahan penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	80 dokumen	61,587,900
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Jumlah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pimpinan	Prosentase perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Poso Kota	100%	8 kali	100%	109,823,046	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	Jumlah Terlaksananya Rapat Koordinasi Pimpinan	Presentasi Potensi gangguan/konflik yang tertangani	8 kali	109,823,046



## BAB V

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan satu tahunan, merupakan panduan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja yang ada di Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Poso dalam menentukan Rencana Kerjanya sehingga komitmen dengan sasaran Prioritas Pemerintah. Rencana Kerja ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang meliputi kebijakan dan Program untuk kurun waktu satu tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, Dokumen Rencana Kerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 ini dilampiri pula dengan berbagai kegiatan sebagaimana terlampir dalam Rencana Kerja ini.

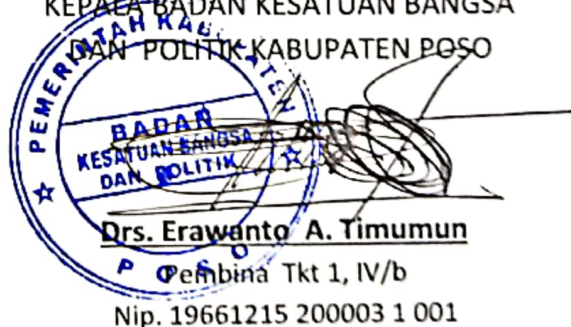
Rencana Kerja ini sebagai panduan yang merupakan komitmen bersama seluruh unit dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Rencana Kerja ini tidak akan berarti apapun, apabila dokumen ini tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berorientasi pada Kinerja. Oleh karena itu Dokumen Rencana kerja ini harus ditindak lanjuti dengan penyusunan penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso. Sehingga implementasi dari kegiatan akan lebih mudah realisasikan.

Dalam rangka mengakomodasikan Program dan Kegiatan yang belum tertampung dalam Rencana Kerja ini maka dapat dilakukan pemutakhiran melalui review/evaluasi Rencana Kerja tahun 2023 secara periodik.

Akhirnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso ini disusun untuk mewujudkan sistim perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja permerintahan yang baik dan akuntabel.

Poso, 3 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN POSO



**BADAN  
KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

**Drs. Erawanto A. Timumon**  
Pembina Tkt 1, IV/b  
Nip. 19661215 200003 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN POSO

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan. Pulau Sumba No. 1 Telp. (0452) 21454 Fax No.21545 Poso 94619

---

### KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO

Nomor 525.1/ /Kesbang Pol/2023

### TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM NEGERI

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO

- Menimbang** :
- a. bahwa Perencanaan pembanunan daerah disusun secara sistematis, terarah terintegrasi dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
  - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan satuan Perangkat Daerah berjalan dengan efektif efisien dan mencapai sasaran serta tujuan pembangunan maka diperlukan suatu pedoman atau acuan perencanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas ,perlu di tetapkan Peraturan di maksud Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tentang Penetapan indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang – undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Neraga yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara((Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 4286);
  4. Undang – undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355).

5. Undang – undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – undang 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran republik Indonesia tahun 2004 nomor104);
7. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 , tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 32 tahun 2008 tentang 4844);
8. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 44380);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan , tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara nomor 4817);
10. Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2010 , tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor... );
11. Peraturan daerah No 1 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) kabupaten Poso tahun 2010 – 2015 ( lembaran daerah kabupaten poso tahun 2011 Nomor 1 );
12. Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2008 , tentang kewenangan Daerah Kabupaten Poso ( Lembaran daerah kabupaten Poso tahun 2008 nomor 1 );
13. Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , ( Lembaran Daerah Kabupaten Poso tahun 2008 Nomor 38 );
14. Peraturan Bupati Poso, Nomor ... tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama(IKU) Kabupaten Poso , ( lembaran daerah kabupaten poso Tahun 2012 Nomor...);
15. Peraturan Daerah No.4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2016-2021.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama ( I K U ) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan , menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran , menyusun dokumen Penetapan Kinerja , menyusun laporan Kinerja Serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Srtateges Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Linerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso dan di sampaikan Kepada Inspektorat kabupaten Poso untuk di lakukan reviu atas pencapaian kinerja dan evaluasi terhadap Sistem Kinerja Instansi Pemerintah .
- KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : P o s o

Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN POSO ,



**Drs. Erawanto A. Timumun**  
Pembina Tkt. I,IV/b  
NIP. 19661215 200003 1 001

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DALAM NEGERI**

Nomor : 825.1/00 /Kesbangpol Tanggal 3 Januari 2023

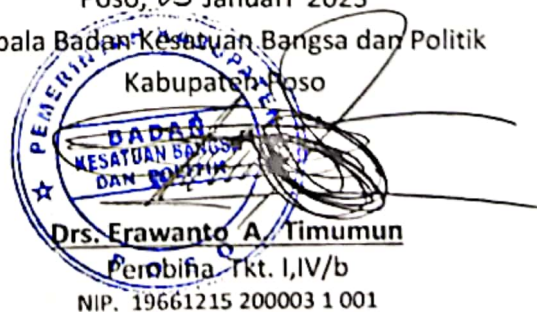
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. URUSAN / BIDANG : Wajib / Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
2. UNIT KERJA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. TUGAS : Menyiapkan bahan kebijakan dibidang Politik, Ideologi dan Penanganan Konflik di Kabupaten Poso.
  
4. FUNGSI :
  1. Perumusan kebijakan pembinaan kesatuan Bangsa
  2. Evaluasi pelaksanaan pembinaan Kesatuan Bangsa
  3. Meningkatkan kegiatan Forum Komunikasi Wawasan Kebangsaan Bagi seluruh komponen masyarakat dan lembaga yang ada Dalam masyarakat.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4	
	Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Terselesaikan nya Konflik Sosial	1 Presentase Siswa Jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA yang mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila	0.005%
			2 Presentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Bela Negara	4%
			3 Presentase Partai Politik yang mendapatkan Pendidikan Politik serta Etika Budaya Politik	100 %
			4 Presentase Ormas yang diberdayakan dan di awasi	100%
			5 Presentase perkembangan Kasus ketahanan ekonomi, Sosial dan pelestarian budaya di 19 kecamatan	100%
			6 Presentase Potensi gangguan/konflik yang tertangani	100%

Poso, 03 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Poso

  
Drs. Erawanto A. Timumun  
Perubifa Tkt. I,IV/b  
NIP. 19661215 200003 1 001



# **PEMERINTAH KABUPATEN POSO**

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan. Pulau Sumba No. 1 Telp. (0452) 21454 Fax No.21545 Poso 94619

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.POSO  
Nomor : 188.45/ /Kesbangpol/2023

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun 2023 di pandang perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822).
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan ketua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 No. 1).
4. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11), Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Poso Nomor 5211).
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 Nomor 14).
6. Keputusan Bupati Poso Nomor 914/0006/DPA/2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019.
7. Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
8. Peraturan Daerah No.4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso tahun 2016-2021.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- Kedua : Dalam Pelaksanaan tugasnya panitia / personil pengelola kegiatan, senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada APBD Kabupaten Poso Tahun 2023.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN POSO



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Poso  
Nomor : 188.48/ 01 / Kesbangpol/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

NAMA – NAMA TIM  
PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

No	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Drs. Erawanto A. Timumun	Penanggungjawab	
2	Leonard M.Nelloh,S.STP.M.Si.	Ketua	
3	Martina Sampali,S.Sos	Sekretaris	
4	Mukhtar.SH.	Anggota	
5	Silfa Kaseside, SH	Anggota	
6	Adriana O. Richard, SH,MAP	Anggota	
7	Elce Maryani Neohi, SH	Anggota	
8	Wahyuni Dwi Jayanti, SH	Anggota	

Ditetapkan Di : Poso  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN POSO

  
Drs. Erawanto A. Timumun  
Pembina Tkt. I,IV/b  
NIP. 19661215 200003 1 001